

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BIRO  
KEUANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja eselon II instansi di BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Biro Keuangan yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Biro Keuangan.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020, capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target Renstra Biro Keuangan 2020-2024, serta penyerapan anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2020. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Biro Keuangan BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, Februari 2021

**BADAN PUSAT STATISTIK**

Plt Kepala Biro Keuangan,



**Darusman**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
BAB I - PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang _____	10
1.2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi _____	10
Tugas _____	11
Fungsi _____	11
Susunan Organisasi _____	11
1.3. Landasan Hukum _____	13
1.4. Sumber Daya Manusia _____	14
1.5. Anggaran _____	18
1.6. Isu Strategis _____	19
BAB II - RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 _____	20
Visi _____	20
Misi _____	20
Tujuan dan Sasaran Strategis _____	20
2.2 Indikator Kinerja Utama _____	22
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020 _____	23
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020 _____	25
SS.1. Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien _____	25
SS.2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien _____	27
SS.3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan _____	28
SS.4. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas _____	28
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Renstra Tahun 2019 _____	30
3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 _____	31
BAB IV - PENUTUP	35
4.1. Tinjauan Umum _____	35
4.2. Tindak Lanjut _____	36



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan	13
Gambar 2. Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Kualifikasi Jabatan	15
Gambar 3. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan kualifikasi pendidikan	16
Gambar 4. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Golongan	16
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	17
Gambar 6. Proporsi Pegawai Menurut Usia	17
Gambar 7. Proporsi Pegawai Menurut Unit Kerja	18
Gambar 8. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Keuangan 2020-2024	21
Gambar 9. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	22
Gambar 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2020 (Juta Rupiah)	33
Gambar 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan untuk Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 (Juta Rupiah)	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan	22
Tabel 2. Penetapan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2020	23
Tabel 3. Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Keuangan Menurut Sasaran Strategis Tahun 2020	25
Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2020	26
Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien Biro Keuangan Tahun 2020	27
Tabel 6. Tingkat Pencapaian Kinerja Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan pada Biro Keuangan Tahun 2020	28
Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Layanan Perbendaharaan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2020	29
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Keuangan Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2019	30
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Komponen Tahun 2020 (Rupiah)	32
Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2020	34

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2020 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan LAKIP Biro Keuangan Tahun 2020.

- Sasaran Biro Keuangan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari salah satu sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan”. Pencapaian sasaran program diukur berdasarkan beberapa indikator program yang salah satunya menjadi tanggung jawab Biro Keuangan BPS yaitu: Indikator persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti yang sumber datanya didapat dari Laporan Kegiatan Biro Keuangan.
- Tujuan dan sasaran kerja Biro Keuangan dijabarkan dalam indikator kinerja, meliputi:
  1. Persentase tuntutan ganti rugi (TGR) yang ditindaklanjuti.
  2. Jumlah aplikasi yang didukung penerapan *smart office* yang digunakan untuk pelayanan administrasi keuangan.
  3. Jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu.
  4. Persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan.
  5. Opini laporan keuangan BPS oleh BPK.
- Secara umum Biro Keuangan telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dimaksud dengan nilai pencapaian kinerja rata-rata sangat baik dengan persentase rata-rata capaian penyelesaian kegiatan mencapai 94,49 persen.
- Pada aspek keuangan, pencapaian penyerapan anggaran Biro Keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 mencapai Rp213.786.043.902 atau sekitar 83,30 persen dari alokasi total pagu anggaran Satuan Kerja Biro Keuangan sebesar Rp256.632.705.000.
- Perbandingan realisasi antara pencapaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa telah tercapai efisiensi pada seluruh sasaran strategis terhadap anggaran yang tersedia.



- *Smart Office* sudah mulai digunakan untuk mempermudah berbagai kegiatan dan pekerjaan di Biro Keuangan. Saat ini sudah ada 15 kegiatan/aplikasi yang telah digunakan dalam menunjang kegiatan di Biro Keuangan.
- Kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan laporan keuangan yang berkualitas dengan opini WTP BPK RI atas Audit Laporan Keuangan, secara umum meliputi:
  1. Masih belum terintegrasinya alur perencanaan keuangan sampai dengan pelaporan keuangan. Walaupun sebagian besar proses pengelolaan keuangan negara pada Biro Keuangan sudah menggunakan teknologi informasi, akan tetapi masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi menjadi satu tempat yang dapat diakses oleh bagian mana pun. Hal ini berdampak pada kecepatan, keakuratan, dan keandalan proses pengelolaan keuangan masih belum seperti yang diharapkan.
  2. Peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara yang makin dinamis, yang menuntut adaptasi yang cepat dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Permasalahan pada tidak meratanya kompetensi dan kapabilitas SDM dalam memahami pengelolaan keuangan negara pada Biro Keuangan berdampak pada keakuratan dan keandalan proses dan hasil pengelolaan yang masih belum sesuai yang diharapkan, seperti masih terdapat dokumen sumber belanja yang direvisi, pengelolaan kas yang masih menjadi temuan berulang pemeriksaan oleh BPK, dan kesalahan pada laporan keuangan yang masih ditemukan pada saat pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Walaupun Laporan Keuangan yang disusun oleh Biro Keuangan pada 4 (empat) tahun terakhir ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, akan tetapi masih terdapat temuan-temuan yang harus dibenahi oleh Biro Keuangan. Jika hal ini dapat diselesaikan maka kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan akan semakin lebih baik.

Semoga pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020 dapat memberikan kontribusi nyata di lingkungan Badan Pusat Statistik, terutama dalam upaya kualitas pengelolaan keuangan Badan Pusat Statistik yang lebih baik dan dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas Audit Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik.

# BAB I - PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS), dalam mengemban tugasnya dalam menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, tentunya harus didukung dengan pengelolaan administrasi keuangan yang efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Biro Keuangan merupakan unit kerja eselon II BPS yang berada di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

Fungsi Biro Keuangan BPS dijalankan melalui satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dengan kegiatannya yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan. Adapun sasaran kegiatan yang dirumuskan yaitu (1) Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien, (2) Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien, (3) Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan, dan (4) terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk mengukur keberhasilan Biro Keuangan dalam pencapaian kegiatan tahun 2020, maka pada awal tahun 2020 telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2020. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Keuangan 2020. Sedangkan Laporan Kinerja Biro Keuangan 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja unit kerja instansi pemerintah. Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Biro Keuangan BPS tahun 2020-2024, sehingga diharapkan laporan ini bisa dapat menjadi bahan acuan untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

## Tugas

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

## Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan administrasi keuangan;
- 2) Pelaksanaan perbendaharaan;
- 3) Pelaksanaan verifikasi; dan
- 4) Pelaksanaan akuntansi.

## Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Biro Keuangan, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik tanggal 14 Mei 2014, terdiri dari:

### 1) *Bagian Administrasi Keuangan*

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha keuangan, pembuatan daftar gaji, dan administrasi tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, dengan penambahan tugas di luar Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tersebut yaitu pembuatan daftar tunjangan kinerja, uang makan dan honor pegawai pemerintah non pegawai negeri.

Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha Keuangan
- b) Subbagian Pembuatan Daftar Gaji
- c) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

### 2) *Bagian Perbendaharaan*

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan pengeluaran, perbendaharaan penerimaan, pembayaran gaji, dan pelaporan perbendaharaan.

Bagian Perbendaharaan terdiri dari:

- a) Subbagian Perbendaharaan I
- b) Subbagian Perbendaharaan II
- c) Subbagian Pelaporan Perbendaharaan

### 3) *Bagian Verifikasi*

Bagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan monitoring penggunaan anggaran.

Bagian Verifikasi terdiri dari:

- a) Subbagian Verifikasi Anggaran
- b) Subbagian *Monitoring* Anggaran

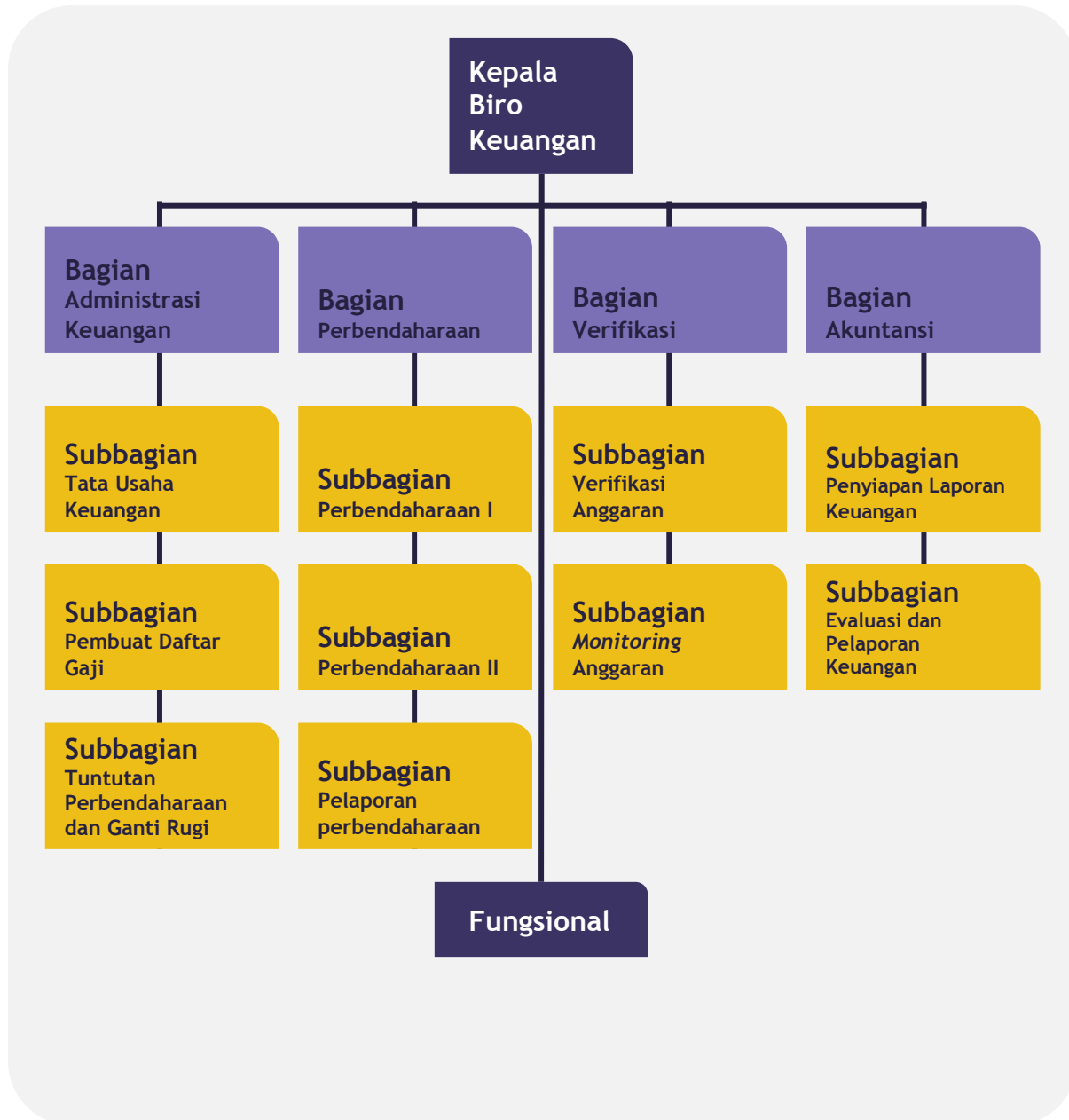
### 4) *Bagian Akuntansi*

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan.

Bagian Akuntansi terdiri dari:

- a) Subbagian Penyiapan Laporan Keuangan
- b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan

Struktur organisasi Biro Keuangan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan

### 1.3. Landasan Hukum

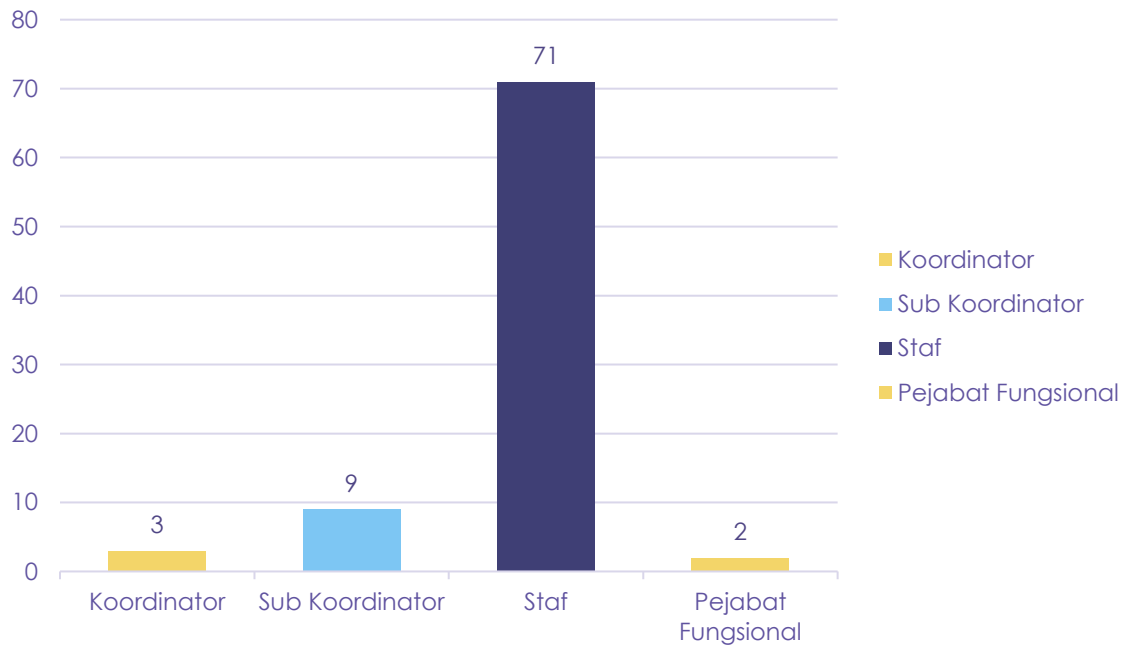
Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- 5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Sub bidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala badan Pusat Statistik Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Sub bidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.

#### **1.4. Sumber Daya Manusia**

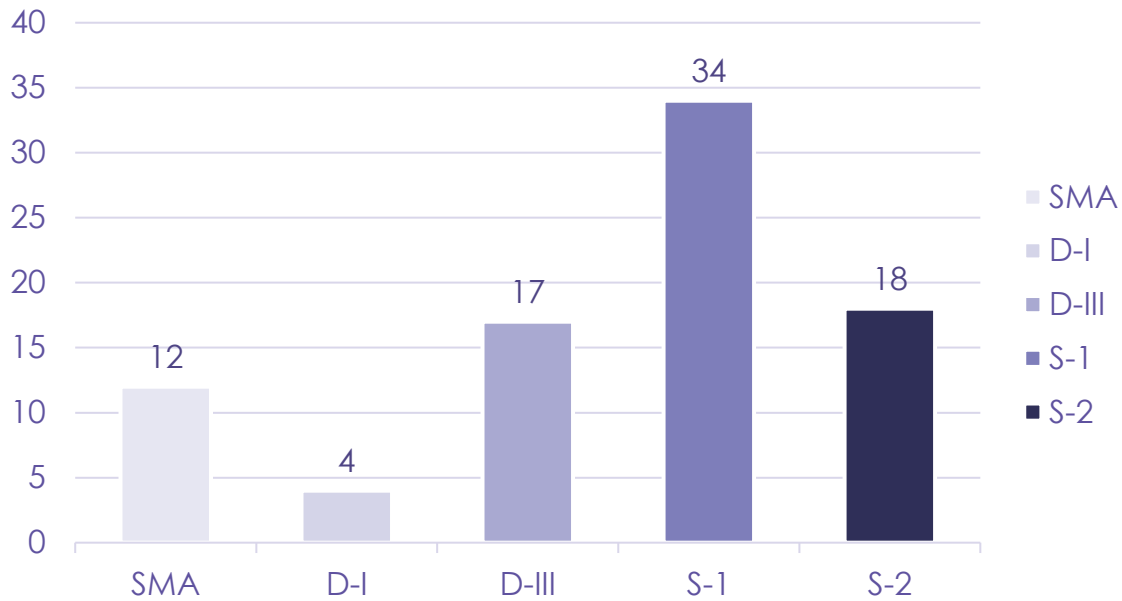
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, diperlukan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten untuk menentukan keberhasilan organisasi pemerintah. Jumlah pegawai Biro Keuangan pada tahun 2020 adalah 85 (delapan puluh lima) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang Koordinator Bagian termasuk pelaksana tugas Kepala Biro, 9 (sembilan) orang Sub Koordinator Bagian, 71 (tujuh puluh tiga) orang staf, dan 2 (dua) orang Pejabat Fungsional.



**Gambar 2. Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Kualifikasi Jabatan**

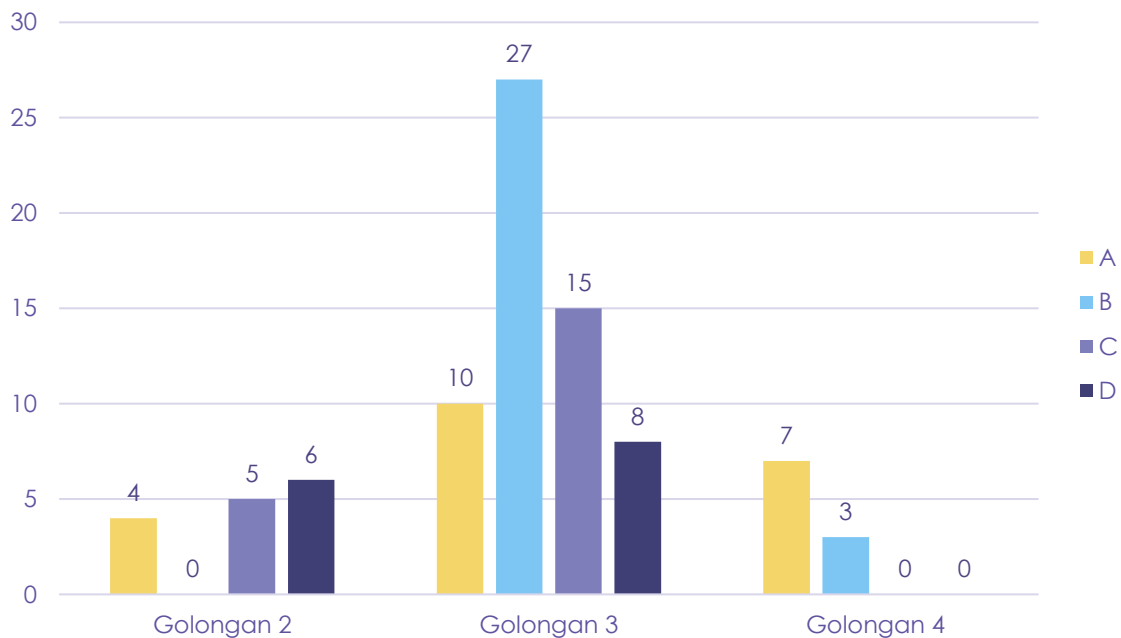
Jumlah SDM yang ada saat ini dirasa masih belum cukup untuk membantu pelaksanaan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ada saat ini. Hal ini cukup mempengaruhi kinerja Biro Keuangan, dimana ada beberapa orang pegawai yang beban kerjanya menjadi lebih besar karena kurangnya tenaga. Kondisi ini juga turut dipengaruhi oleh tidak meratanya penyebaran kompetensi SDM, yang selain dipengaruhi oleh faktor usia, juga cukup dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Dapat dilihat pada Gambar 3, sebagian besar pegawai di Biro Keuangan berpendidikan S1. Dari 85 orang pegawai di Biro Keuangan, tercatat sebanyak 18 pegawai berpendidikan S2, 34 pegawai berpendidikan S1, 17 pegawai berpendidikan D-III, 4 pegawai berpendidikan D-I, dan 12 pegawai berpendidikan SMA.



**Gambar 3. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan kualifikasi pendidikan**

Klasifikasi pegawai (PNS) berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III sebesar 60 (70,59%) orang dari jumlah PNS sebesar 85 orang. Sedangkan golongan II dan IV hanya menempati 17,65% dan 11,76% sisanya dengan rincian seperti pada tabel berikut:



**Gambar 4. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Golongan**

Klasifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebesar 52 orang dari jumlah pegawai di Biro Keuangan sebesar 85 orang seperti terlihat pada gambar 5.

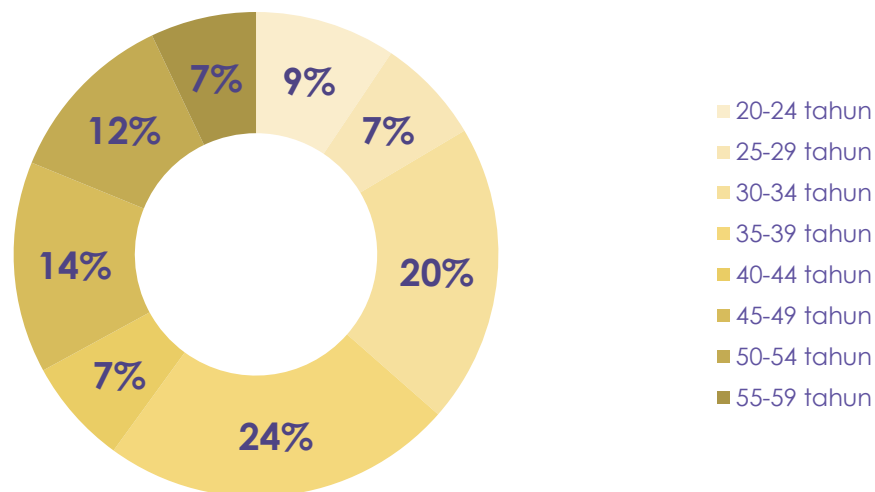


Terlihat khususnya pada golongan 3B sampai dengan 4A, pegawai perempuan lebih mendominasi ketimbang pegawai laki-laki.



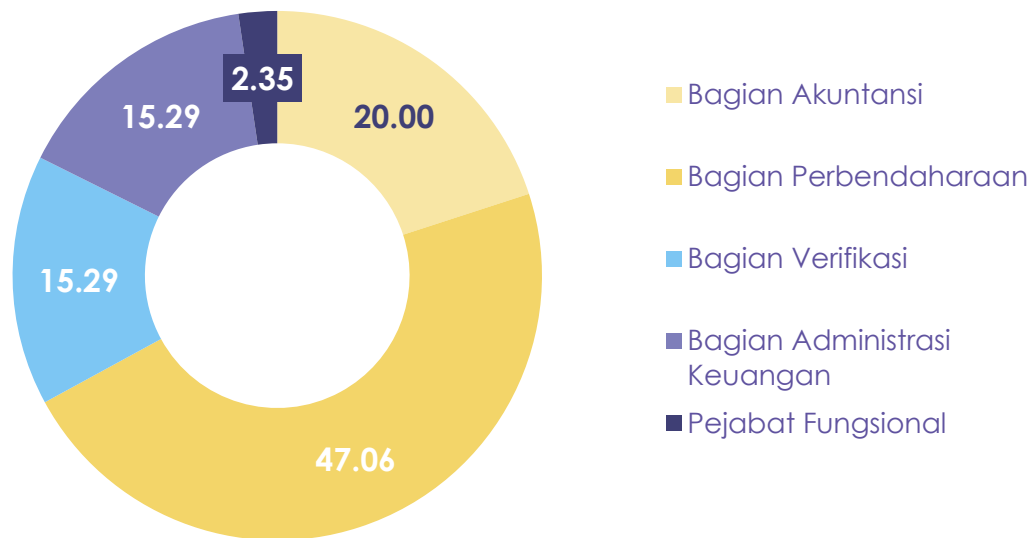
**Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan**

Proporsi pegawai berdasarkan usia didominasi oleh pegawai dengan usia 30-39 tahun seperti yang terlihat pada Gambar 6. Pada Biro Keuangan, 24 persen pegawainya adalah pegawai dengan usia 35-39 tahun dan 20 persen pegawainya adalah pegawai dengan usia 30-34 tahun. Sisanya hampir semua kategori umur memiliki proporsi di bawah 10 persen kecuali kategori umur 45-49 tahun dan 50-54 tahun yang memiliki proporsi sebesar 14 dan 12 persen.



**Gambar 6. Proporsi Pegawai Menurut Usia**

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan jumlah pegawai untuk setiap unit kerja bagian. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 7. Jumlah pegawai pada unit kerja Bagian Administrasi Keuangan sebanyak 13 orang, Bagian Verifikasi sebanyak 13 orang, Bagian Akuntansi sebanyak 17 orang, dan Pejabat Fungsional sebanyak 2 orang. Sedangkan jumlah pegawai pada unit kerja Bagian Perbendaharaan sebanyak 40 orang. Pejabat Fungsional pada Gambar 7 di atas merupakan pejabat yang tidak masuk dalam struktur organisasi bagian pada Biro Keuangan.



**Gambar 7. Proporsi Pegawai Menurut Unit Kerja**

## 1.5. Anggaran

Biro Keuangan memiliki pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp256.632.705.000 dengan realisasi sebesar Rp213.786.043.902 atau 83,30 persen. Anggaran Biro Keuangan tahun 2020 terdiri dari belanja penempatan/mutasi pegawai, pengelolaan perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan, gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor. Anggaran belanja penempatan/mutasi pegawai sebesar Rp6.244.883.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp6.094.389.982 atau 97,59 persen, anggaran belanja pengelolaan perbendaharaan sebesar Rp607.847.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp452.542.401 atau 74,45 persen, anggaran belanja penyusunan laporan keuangan sebesar Rp302.689.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp105.600.463 atau 34,89 persen, anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp248.058.478.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp205.859.391.056

atau 82,99 persen, anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp1.418.808.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.274.120.000 atau 89,80 persen.

## 1.6. Isu Strategis

Kondisi dan tantangan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan aturan dan kebijakan bidang keuangan dari Kementerian Keuangan yang memerlukan disusunnya petunjuk teknis dan pelaksanaan baru dalam penerapannya di lingkungan Badan Pusat Statistik.
2. Tingginya tingkat kebutuhan atas SDM pengelola keuangan yang berkualitas di satker pada lingkungan Badan Pusat Statistik, sehingga Biro Keuangan perlu melakukan pembinaan SDM bidang keuangan.
3. Tingginya tingkat kebutuhan atas SDM *programmer* yang berkualitas di Biro Keuangan untuk menunjang pekerjaan yang saat ini mulai mengarah ke teknologi informasi.
4. Adanya tantangan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dari bidang terkait seperti Inspektorat maupun BPK untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan akuntabel.

# BAB II - RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA

## 2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Dalam melakukan tugasnya selama lima tahun kedepan, Biro Keuangan telah menyusun Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 yang tentunya mengacu pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran Biro Keuangan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Utama. Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Biro Keuangan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Keuangan yang tertuang dalam Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### Visi

Biro Keuangan mempunyai visi yaitu “Pengelola Keuangan yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel”.

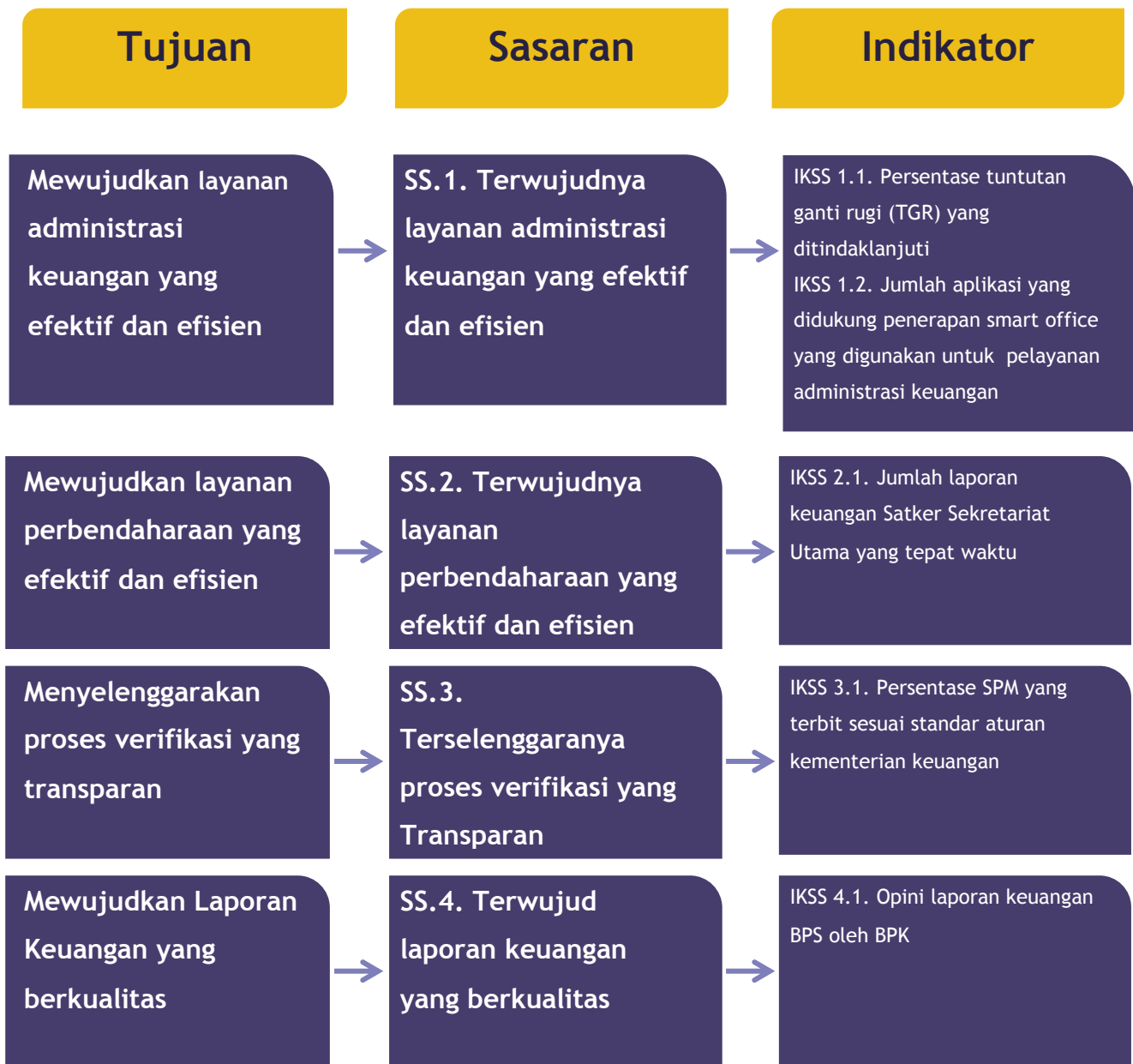
### Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Keuangan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien.
- 3) Menyelenggarakan proses verifikasi yang transparan.
- 4) Mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

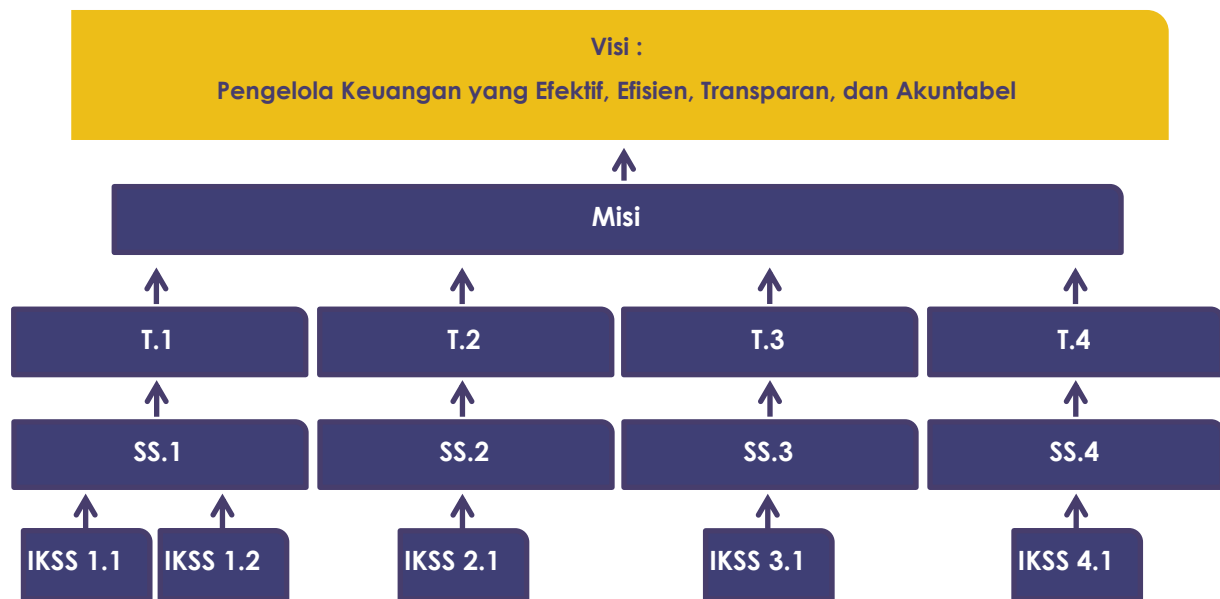
### Tujuan dan Sasaran Strategis

Biro Keuangan mempunyai empat tujuan yang dicanangkan dalam Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024. Tujuan Biro Keuangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.



Gambar 8. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Keuangan 2020-2024

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Keuangan dapat terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 9. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Biro Keuangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Persentase tuntutan ganti rugi (TGR) yang ditindaklanjuti	Bagian Administrasi Keuangan

		Jumlah aplikasi yang didukung penerapan <i>smart office</i> yang digunakan untuk pelayanan administrasi keuangan	Setiap Bagian di lingkungan Biro Keuangan
2.	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu	Bagian Perbendaharaan
3.	Terselenggaranya proses verifikasi yang Transparan	Persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	Bagian Verifikasi
4.	Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	Bagian Akuntansi

### 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020

Pada awal tahun 2020, Biro Keuangan telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan Biro Keuangan dalam memenuhi tugasnya di tahun 2020. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Keuangan yang merupakan bentuk komitmen Biro Keuangan kepada Sekretaris Utama BPS. Berikut tabel penetapan kinerja Biro Keuangan tahun 2020 untuk masing-masing indikator sasaran.

**Tabel 2. Penetapan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Persentase tuntutan ganti rugi (TGR) yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Jumlah aplikasi yang didukung penerapan <i>smart office</i> yang digunakan untuk pelayanan administrasi keuangan	Aplikasi	15

2.	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	5
3.	Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	Persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	Persen	95
4.	Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	Opini	WTP



## BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Akuntabilitas kinerja Biro Keuangan merupakan perwujudan kewajiban Biro Keuangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Biro Keuangan 2020 dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja selama tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020.

Pada tahun 2020, rata-rata capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 94,49 persen.

**Tabel 3. Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Keuangan Menurut Sasaran Strategis Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	2	100
2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	1	100
3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	1	74,08
4. Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	1	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>		<b>94,49</b>

### SS.1. Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien

Sasaran pertama ini merupakan tugas pokok Biro Keuangan dalam mewujudkan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan terkait proses administrasi bidang keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran kegiatan teknis bidang statistik. Dalam pelaksanaannya, Biro Keuangan menyediakan suatu sistem yang saling terhubung dan terintegrasi pada masing-

masing bagian sehingga menghasilkan layanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

Dalam memberikan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien, Biro Keuangan tetap mengedepankan *good governance* dalam pengelolaannya. *Good governance* dicapai dengan cara menata kelembagaan pada Biro Keuangan sehingga dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih serta menjaga setiap fungsi berjalan secara maksimal, memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusia dengan senantiasa meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai, serta mengikuti secara aktif perkembangan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara.

Rata-rata tingkat capaian sasaran “Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang efektif dan efisien” adalah sebesar 100 persen. Apabila dilihat per indikator, seluruh target dari indikator kinerja dapat dicapai dengan baik. Indikator persentase tuntutan ganti rugi (TGR) yang ditindaklanjuti mendapatkan capaian 100 persen dari realisasi 100 persen dibagi target 100 persen kasus TGR yang ditindaklanjuti. Indikator jumlah aplikasi yang didukung penerapan *smart office* yang digunakan untuk pelayanan juga mendapat capaian 100 persen dengan realisasi 15 aplikasi dari target 15 aplikasi.

Indikator persentase tuntutan ganti rugi (TGR) yang ditindaklanjuti mendapatkan capaian 100 persen dari total 16 kasus yang ditindaklanjuti. Untuk TGR jenis kasus wanprestasi Ikatan Dinas/Tugas Belajar terdapat 3 (tiga) kasus baru di tahun 2020. Untuk TGR jenis kasus kehilangan kendaraan roda dua terdapat 5 (lima) kasus baru di tahun 2020 dan untuk TGR jenis kasus kehilangan barang inventaris kantor terdapat 8 (delapan) kasus baru di tahun 2020.

Aplikasi yang didukung penerapan *smart office* yang digunakan untuk pelayanan mendapatkan capaian 100 persen dari total 15 aplikasi. Kegiatan yang telah menggunakan *smart office* yaitu, pembuatan daftar gaji (GPP), tunjangan kinerja dan honor PPNPN (TK OnLine dan PPNPN OnLine), uang makan (GPP), biaya pindah (Web Pengusulan Biaya Pindah), penataan arsip (Sekar), SPM (SAS), proses monitoring pembayaran pendapatan negara (SIMPONI), transaksi belanja negara (SPANIN), pengolahan dan penyusunan laporan laporan keuangan (SAIBA), proses monitoring dan penyusunan laporan keuangan (E-REKON), penyusunan laporan keuangan Sestama (E-CALK), dan proses penatanusahaan rekening (SPRIN). laporan verifikasi anggaran (Sivera), laporan realisasi *monitoring* (SAS), laporan keuangan Instansi (E-CALK),

**Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2020**

Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase tuntutan ganti rugi (TGR) yang ditindaklanjuti	100	100	100,00
Jumlah aplikasi yang didukung penerapan <i>smart office</i> yang digunakan untuk pelayanan	15	15	100,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>100,00</b>

## SS.2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien

Sasaran terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien pada tahun 2020 rata-rata capaian sebesar 100 persen, namun dalam pencapaian ini masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi untuk mendapatkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Sasaran kedua ini adalah perwujudan dari tujuan mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel yang efektif dan efisien. Dalam mewujudkan tujuan ini, maka setiap proses realisasi belanja dan pendapatan dilaksanakan secara teliti, transparan, dan didukung oleh dokumen sumber terkait yang andal. Setiap tahapan proses pelaksanaan layanan keuangan dilakukan secara hati-hati tanpa mengabaikan kecepatan dan ketepatan proses serta didukung otorisasi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu, Laporan TGR Semester 1 Tahun 2020, Laporan TGR Semester 2 Tahun 2020, Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2019, Laporan Keuangan Semester 1 2020, dan Laporan Keuangan Tahunan 2020 *Unaudited*.

Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien Biro Keuangan Tahun 2020

Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)

Jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu	5	5	100,00
---	---	---	--------

<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>100,00</b>
----------------------------------	--	--	---------------

### SS.3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan

Sasaran ketiga adalah terselenggaranya proses verifikasi keuangan. Sasaran ini diwujudkan dengan proses pemeriksaan setiap dokumen keuangan yang dihasilkan dari proses pelaksanaan anggaran dilakukan secara sistematis dan transparan. Proses verifikasi keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan baik dalam jumlah, peruntukannya, dan dokumen-dokumen pendukungnya.

Pada tahun 2020, sasaran terselenggaranya proses verifikasi yang transparan mendapatkan capaian sebesar 77,98 persen. Capaian yang tidak sesuai dengan target disebabkan jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak sebanyak yang ditargetkan karena adanya pemotongan anggaran dan pembatalan kegiatan akibat kondisi pandemik *Covid-19*. Selain itu, KPPN menerapkan kebijakan simplikasi SPM yang mengharuskan jumlah SPM bernilai kecil untuk digabungkan dengan SPM lainnya sehingga jumlah SPM menjadi lebih sedikit.

**Tabel 6. Tingkat Pencapaian Kinerja Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan pada Biro Keuangan Tahun 2020**

Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	95	74,08	77,98
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>77,98</b>

### SS.4. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas

Sasaran keempat adalah terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa setiap

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada BPS.

Biro Keuangan sebagai unit yang mengelola keuangan BPS melaksanakan proses akuntansi dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pada setiap akhir periode pelaporan keuangan, laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh Biro Keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan tersebut berupa opini. Opini yang ditargetkan untuk dicapai pada setiap akhir pelaksanaan APBN adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada tahun 2020, sasaran terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas mendapatkan capaian sesuai target, yaitu sebesar 100 persen. Pencapaian ini ditandai dengan perolehan opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2019 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini ini diperoleh dengan melihat tidak ditemukannya salah saji secara material pada laporan keuangan, laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan disusun dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan laporan keuangan disajikan dengan penyajian yang wajar. Disamping itu pula bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan telah ditindaklanjuti.

**Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Layanan Perbendaharaan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2020**

Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>100</b>

### 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Renstra Tahun 2019

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Jika dibandingkan realisasi tahun 2020 terhadap target Renstra periode sebelumnya, capaian kinerja lima indikator yang mewakili kinerja Biro Keuangan untuk Periode Renstra 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator kinerja yang mencapai target kinerja yaitu persentase SPM yang terbit sesuai standar ketentuan, sedangkan indikator lainnya yaitu persentase tuntutan ganti rugi (TGR) yang ditindaklanjuti, jumlah aplikasi yang didukung penerapan smart office yang digunakan untuk pelayanan administrasi keuangan, jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu, opini laporan keuangan BPS oleh BPK masih sama dengan tahun sebelumnya dan sesuai target.
2. Terdapat 1 indikator yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu jumlah aplikasi yang didukung penerapan smart office yang digunakan untuk pelayanan administrasi keuangan dan telah sesuai targetnya.

**Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Keuangan Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2019**

Indikator	Target Renstra		Realisasi 2020	Capaian Thd Target (%)	
	2019	2020		2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jumlah Laporan Keuangan yang terbit tepat waktu	8.541	-	-	-	-
2. Persentase TGR yang ditindaklanjuti	100	100	100	100,00	100
3. Persentase Surat Permintaan Pembayaran	100	-	-	-	-

	yang menjadi Surat Perintah Membayar					
4.	Persentase SPM yang menjadi SP2D	99	-	-	-	-
5.	Persentase SPM yang terbit sesuai standar ketentuan	96	95	74,08	77,17	77,97
6.	Persentase SP2D yang dientri ke dalam aplikasi SPM	100	-	-	-	-
7.	Persentase satker yang mengirimkan data e-audit bulanan	0	-	-	-	-
8.	Tingkat akurasi data realisasi keuangan BPS (LK BPS-unaudited ke LK BPS audited)	96	-	-	-	-
9.	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	100	100
10.	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100	-	-	-	-
11.	Jumlah aplikasi yang didukung penerapan <i>smart office</i> yang digunakan untuk pelayanan	-	15	15	-	100
12.	Jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu	-	5	5	-	100

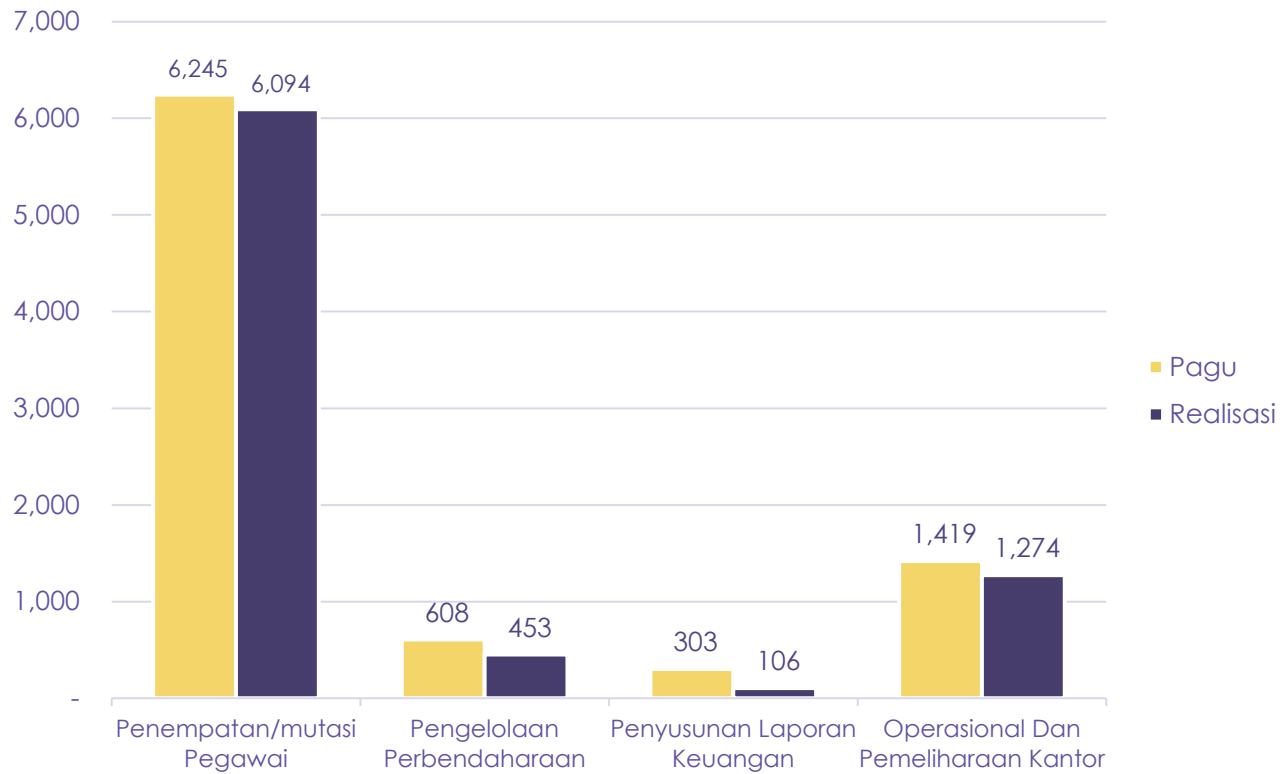
### 3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020, Biro Keuangan menerima pagu anggaran sebesar Rp256.632.705.000 dengan realisasi sebesar Rp213.786.043.902 atau 83,30 persen. Anggaran pada Biro Keuangan terdiri dari belanja untuk penempatan/mutasi pegawai, pengelolaan perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan, gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor. Anggaran penempatan/mutasi pegawai sebesar Rp6.244.883.000 dengan realisasi sebesar Rp6.094.389.982 atau 97,59 persen, anggaran pengelolaan perbendaharaan sebesar Rp607.847.000 dengan realisasi sebesar Rp452.542.401 atau 74,45 persen, anggaran penyusunan laporan keuangan sebesar Rp302.689.000 dengan realisasi sebesar Rp105.600.463 atau 34,89 persen, anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp248.058.478.000 dengan realisasi sebesar Rp205.859.391.056 atau 82,99 persen, dan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp1.418.808.000 dengan realisasi sebesar Rp1.274.120.000 atau 89,80 persen.

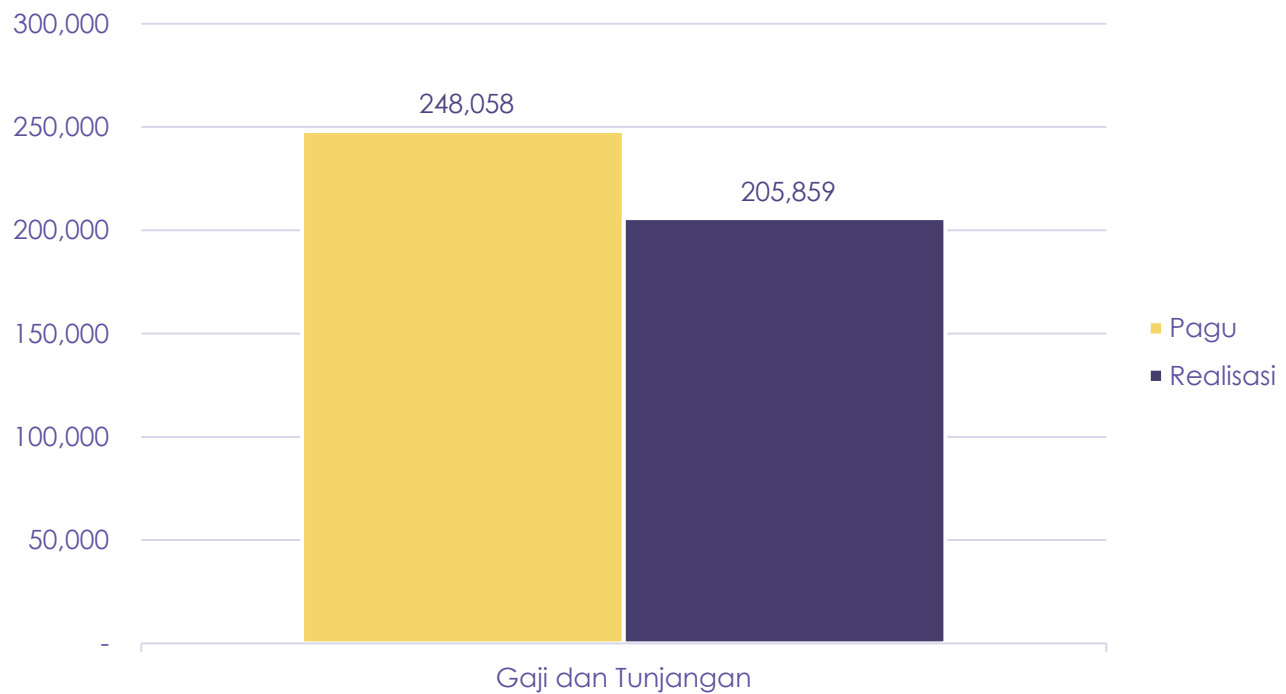
**Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Komponen Tahun 2020**  
(Rupiah)

Komponen	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penempatan/ mutasi Pegawai	6.244.883.000	6.094.389.982	97,59
Pengelolaan Perbendaharaan	607.847.000	452.542.401	74,45
Penyusunan Laporan Keuangan	302.689.000	105.600.463	34,89
Gaji dan Tunjangan	248.058.478.000	205.859.391.056	82,99
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.418.808.000	1.274.120.000	89,80
<b>Jumlah</b>	<b>256.632.705.000</b>	<b>213.786.043.902</b>	<b>83,30</b>





**Gambar 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2020 (Juta Rupiah)**



**Gambar 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan untuk Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 (Juta Rupiah)**

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan efisiensi penganggaran. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran Biro Keuangan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah, terlihat bahwa Biro Keuangan mampu melakukan efisiensi pada seluruh sasaran strategis.

**Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2020**

Tahun	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
2020	1. Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Penempatan/mutasi Pegawai Gaji dan Tunjangan
2020	2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Pengelolaan Perbendaharaan
	3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
2020	4. Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	Penyusunan Laporan Keuangan
2020	94,49	83,30

## BAB IV - PENUTUP

### 4.1. Tinjauan Umum

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan BPS tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 94,49 persen. Upaya-upaya untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja perlu terus dilakukan oleh Biro Keuangan. Untuk tahun 2020, penyerapan anggaran Biro Keuangan pada program DMPTTL mencapai 83,30 persen.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai alat penilaian serta kendali atas pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan masukan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Secara umum tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal dengan capaian kinerja mencapai 94.49 persen. Dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan, capaian sasaran utama dari indikator *outcome* Biro Keuangan untuk mendukung sasaran program Sekretariat Utama BPS terkait “Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan” untuk tahun 2020, bisa terlihat setelah munculnya opini BPK-RI atas Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2020. Diharapkan Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2020 mendapat opini WTP dari BPK, sehingga mampu mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya.

Namun, hasil yang diperoleh harus tetap perlu dievaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam perencanaan kegiatan Biro Keuangan pada waktu yang akan datang. Adapun pencapaian penyerapan anggaran Biro Keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 mencapai 83,30 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama yang mencapai 98,21 Persen di tahun 2019.

## 4.2. Tindak Lanjut

Dari capaian kinerja yang sudah diraih Biro Keuangan BPS pada tahun 2020, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk kedepannya yaitu lebih meningkatkan pelayanan di bidang keuangan sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa aspek yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja Biro Keuangan BPS pada tahun 2021. Beberapa hal tersebut dituangkan dalam kegiatan sehingga aspek pencapaiannya dalam pemenuhan di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan, antara lain:

1. Jika dimungkinkan perlu dilakukan penambahan SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang lebih memadai. Jika penambahan itu tidak dimungkinkan, maka sangat perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi untuk SDM yang ada saat ini baik melalui proses pendidikan maupun pelatihan yang sesuai dan memadai. Secara khusus, perlu dilakukan pelatihan bagi seluruh SDM Biro Keuangan terkait aplikasi keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan aplikasi-aplikasi *smart office* yang dibuat oleh BPS ataupun pihak lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran yang tertib di lingkup Biro Keuangan dan juga mempermudah pelaksanaan pembinaan keuangan satuan kerja di lingkungan BPS khususnya dalam penggunaan aplikasi keuangan. Selain itu, pembagian tugas dan penugasan untuk masing-masing pegawai mungkin harus disusun ulang, agar pembagian tugas seimbang dan tepat. Dengan demikian potensi tiap-tiap pegawai bisa digunakan dengan maksimal.
2. Perlu dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan pelaksanaan kegiatan. Sebisa mungkin pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Rencana Aksi yang sudah dilakukan perlu dilanjutkan, namun harus ada kerja sama dan koordinasi dari semua unit di Biro Keuangan, sehingga tidak ada sasaran kegiatan yang tumpang tindih atau bentrok jadwal pelaksanaannya. Adapun rencana kerja yang sudah disusun ini harus siap untuk disesuaikan setiap saat, bilamana memang muncul perubahan prioritas pekerjaan.
3. Perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan di internal Biro Keuangan untuk segera bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak yang tepat. Jika memang ada perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan, maka penjadwalan ulang semua kegiatan harus dilakukan dengan segera, sehingga semua target capaian kinerja bisa dipenuhi.

4. Koordinasi yang berkesinambungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan yang telah berjalan dengan baik harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan prestasinya untuk tahun-tahun yang akan datang.

Pada akhirnya, diharapkan LAKIP Biro Keuangan ini akan memberikan gambaran riil atas pencapaian kinerja Biro Keuangan dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2020. Semoga hasil evaluasi yang dituangkan dalam LAKIP ini dapat berguna sebagai umpan balik dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Keuangan untuk tahun-tahun yang akan datang.